

**PENYELESAIAN KLAIM PRULINK (PRUDENTIAL UNIT LINK)  
DI PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE SURAKARTA**



**NASKAH PUBLIKASI**

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-Syarat  
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

AYU OCTAVIA NINGTYAS

NIM: C 100080060

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2013**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Naskah Publikasi ini telah disetujui di hadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

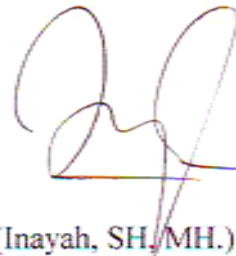
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



(Kelik Wardiono, SH, MH.)

Pembimbing II



(Inayah, SH, MH.)



Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Muchammad Iksan, S.H., M.H)

## **NASKAH PUBLIKASI ILMIAH**

### **PENYELESAIAN KLAIM PRULINK (PRUDENTIAL UNIT LINK) DI PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE SURAKARTA**

**NAMA : AYU OCTAVIA NINGTYAS NIM : C.100080060**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

#### **ABSTRAK**

#### **PENYELESAIAN KLAIM PRULINK(PRUDENTIAL UNIT LINK) DI PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE SURAKARTA**

Salah satu jenis asuransi yang melindungi dan memberikan jaminan terhadap jiwa dan fisik manusia adalah asuransi kecelakaan diri. Asuransi kecelakaan adalah suatu perjanjian antara perusahaan asuransi sebagai penanggung dengan pemegang polis atau pihak yang mengasuransikan, dimana dengan menerima premi asuransi, perusahaan asuransi akan membayar biaya santunan dan menyediakan pengganti kerugian.

Untuk mengetahui pelaksanaan hak dan kewajiban, Penulis mengadakan penelitian di PT Prudential Life Assurance, Unit Link Surakarta, dengan sampel kasus klaim polis asuransi.

Kewajiban dan hak para pihak berjalan seiringan dimana kewajiban tertanggung adalah membayar premi dan hak tertanggung adalah menerima santunan ganti rugi apabila terjadi klaim. Sedangkan kewajiban penanggung adalah membayarkan santunan ganti rugi apabila terjadi klaim dan menerima premi sebagai haknya. Dalam praktek asuransi terdapat istilah tidak ada premi tidak ada klaim.

Hambatan-hambatan yang ada dalam pelaksanaan perjanjian asuransi kecelakaan diri dapat berasal dari pihak penanggung maupun pihak tertanggung. Hambatan muncul karena kurang adanya komunikasi para pihak dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya masing-masing. Hambatan-hambatan tersebut dapat diminimalisir dengan memaksimalkan tugas, staf pemasaran asuransi dalam menginformasikan hal-hal penting dalam polis pada saat awal penutupan asuransi, sehingga pada saat klaim diharapkan dapat mengurangi perselisihan.

**Kata kunci : Hak, Kewajiban dan Klaim**

## **ABSTRACT**

### **SETTLEMENT OF CLAIMS PRUlink (PRUDENTIAL UNIT LINK) IN. PRUDENTAIL LIFE ASSURANCE SURAKARTA**

One type of insurance that protects and guarantees the human soul and the physical is personal accident insurance. Accident insurance is a contract between an insurance company as an underwriter with the policyholder or the insured party, which by accepting the insurance premiums, the insurance company will pay compensation and provide offsets.

In order to determine the rights and obligations, author conducted research at PT Prudential Life Assurance, unit link Surakarta, with a sample of insurance claims case.

Obligations and rights of the parties go hand in hand in which the insured obligation is to pay the premium and the right of the insured is receiving financial compensation in case of a claim. While the liability insurer is paying the financial compensation in the event of claims and receive a premium as debt. In practical terms there is no insurance premium no claims.

Barriers that exist in the implementation of accident insurance agreements can be derived from the insurer and the insured. Obstacles arise because of a lack of communication of the parties in the implementation of rights and obligations of each. These constraints can be minimized by maximizing assignment, insurance marketing staff in informing the important things in the policy at the beginning of insurance coverage, so that when the claim is expected to reduce disputes.

**Keywords:** Rights, Obligations and Claims

## A. Pendahuluan

Setiap orang pasti mempunyai risiko yang mungkin akan terjadi dalam perjalanan hidupnya, baik resiko datangnya dari unsur ketidaksengajaan maupun dari unsur kecerobohan darimanusia itu sendiri. Seseorang tidak ingin menderita dan selalu berusaha mencegahnya, ataupun menanggulangi resiko yang mungkinakan terjadi.Usaha menanggulangi resiko itu baru dirasakan sasarannya setelahtujuan penanggulangan risiko itu dilakukan melalui suatu ikatan khusus yang diadakan untuk penanggulangan resiko itu, yaitu perjanjian pertanggungan atau dalampraktek perusahaan pertanggungan lebih banyak dikenal dan dipakai dengan kata Asuransi.<sup>1</sup>Pengertian Pertanggungan pada umumnya diatur dalam KUHPerdato Pasal 246 yang berbunyi sebagai berikut: “Pertanggungan adalah perjanjian timbal balik antara penanggung dengan penutup asuransi, dimana penanggung mengikatkan diri untukmengganti kerugian dan atau membayar sejumlah uang (santunan) yang ditetapkan pada waktu penutupan perjanjian, kepada penutup asuransiatau orang lain yang ditunjuk, pada waktu terjadinya evenemen, sedangkan penutup asuransi mengikatkan diri untuk membayar uang premi.”<sup>2</sup>

Disadari bahwa asuransi mempunyai beberapa manfaat antara lain *pertama*, membantu masyarakat dalam rangka mengatasi segala masalah risiko yang dihadapinya. Hal itu akan memberikan ketenangan dan kepercayaan diri yang lebih tinggi kepada yang bersangkutan. *Kedua*, asuransi merupakan sarana pengumpulan dana yang cukup besar sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dana pembangunan. *Ketiga*, sebagai sarana untuk mengatasi risiko – risiko yang dihadapi dalam melaksanakan pembangunan. Selain itu, meskipun banyak metode untuk menangani risiko, asuransi merupakan metode yang paling banyak dipakai. Karena asuransi menjanjikan perlindungan kepada pihak tertanggung

---

<sup>1</sup>Abdulkadir Muhammad, 1994, *Pengantar Hukum Pertanggungan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 6.

<sup>2</sup>H.M.N. Purwosutjipto, 1983, *Pengetian Pokok Hukum Dagang Indonesi*axii, Djambatan, Jakarta, halaman 10.

terhadap risiko yang dihadapi perorangan maupun risiko yang dihadapi oleh perusahaan.<sup>3</sup>

Secara khusus, tujuan dari asuransi jiwa adalah untuk mengganti kerugian finansial dari individu, keluarga dan perusahaan yang timbul pada waktu sumber daya manusia sakit, cacat atau meninggal. Pada asuransi jiwa yang dipertanggungjawabkan ialah yang disebabkan oleh kematian (*death*). Kematian tersebut mengakibatkan hilangnya pendapatan seseorang atau suatu keluarga tertentu. Risiko yang mungkin timbul pada asuransi jiwa terutama terletak pada “unsur waktu (*time*), oleh karena sulit untuk mengetahui kapan seseorang meninggal dunia. Untuk memperkecil risiko tersebut, maka sebaiknya diadakan pertanggungan jiwa.

Seperti dalam hal pemegang polis asuransi jiwa yang belum waktunya mengajukan klaim asuransi setelah masa pertanggungan berakhir, dalam praktek disebut pula klaim habis kontrak, diminta untuk memperbaharui polis asuransinya dengan alasan petugas penagih asuransi belum menyerahkan premi asuransi pemegang polis kepada perusahaan. Padahal pemegang polis sudah membayar preminya. Pembaharuan polis itu membawa akibat jumlah premi yang harus dibayarkan meningkat. Konsekuensinya pengeluaran pemegang polis asuransi jiwa yang bersangkutan akan bertambah perbulan atau pertahunnya, dan ia akan berada pada posisi yang sangat dirugikan.

Sebab kelalaian petugas premi (agen asuransi) dalam bentuk tidak disetorkannya premi kepada perusahaan asuransi dibebankan kepada pemegang polis asuransi jiwa yang bersangkutan, berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, petugas penagih premi baik secara perorangan ataupun badan hukum, sepanjang petugas tersebut telah diberi kuasa untuk itu, segala tindakannya menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi.

---

<sup>3</sup>M. Suparman Sastrawidjaja, SH., SU dan Endang, SH. 1993. *Hukum Asuransi*. Bandung : Alumni. Hal. 116

Petugas penagih premi memberikan bukti pembayaran premi asuransi yang sah bersamaan atau pada saat konsumen menyerahkan pembayaran uang premi. Ini membuktikan bahwa perusahaan asuransi tidak dibenarkan mengelak dari tanggung jawabnya. Berdasarkan atas penelitian penulis bahwa seringkali timbul hambatan-hambatan pada saat pelaksanaan penyelesaian klaim asuransi, beberapa contoh kasusnya yaitu lambannya penanganan berkenaan dengan cairnya uang tuntutan ganti kerugian yang seharusnya menjadi hak tertanggung disebabkan karena lambannya proses persetujuan dari Kantor Pusat Perusahaan Asuransi; pembaharuan polis asuransi dengan alasan agen petugas penagih asuransi belum menyerahkan premi asuransi pemegang polis kepada perusahaan; kelalaian agen petugas asuransi dalam bentuk tidak disetorkannya premi kepada perusahaan asuransi sehingga dibebankan kepada pemegang polis; hambatan penyelesaian klaim asuransi karena disebabkan tidak lengkapnya dokumen-dokumen yang harus dipenuhi.

Pada saat pengajuan klaim sehingga hal ini dapat memperlambat proses pelaksanaan klaim asuransi jiwa. Maka perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan perlu melakukan upaya-upaya tertentu guna mengatasi hambatan-hambatan tersebut agar pelaksanaan penyelesaian klaim asuransi jiwa dapat berjalan dengan baik.

Dengan melihat permasalahan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian karena penulis melihat adanya beberapa masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelesaian klaim asuransi di PT. Prudential Life Assurance Unit Link Surakarta.

## **B. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengertian Asuransi**

Bab IX Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD)

adalah sebagai berikut : Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu.

Definisi yang lebih luas lagi dari pada definisi pasal 246 KUHD adalah definisi pasal 1 angka(1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian menyatakan bahwa : Asuransi atau pertanggungan itu adalah perjanjian antara kedua belah pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima suatu premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita pihak tertanggung, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Dari definisi-definisi yang diberikan tentang asuransi tersebut di atas diketahui bahwa inti dari tujuan suatu asuransi adalah mengalihkan risiko dari tertanggung yang mempunyai kepentingan terhadap obyek asuransi kepada penanggung yang timbul sebagai akibat adanya ancaman bahaya terhadap harta kekayaan atau terhadap jiwanya.

## 2. Polis Sebagai Dokumen Perjanjian Asuransi

Menurut ketentuan Pasal 255 KUHD, perjanjian pertanggungan harus dibuat secara tertulis didalam sebuah akta yang disebut polis. Polis ini sebagai alat bukti tertulis bahwa telah terjadi pertanggungan antara penanggung dengan tertanggung. Didalam polis tersebut disebutkan bahwa semua ketentuan dan persyaratan tentang pertanggungan yang telah dibuat.<sup>4</sup>

Secara material, perjanjian asuransi atau perjanjian pertanggungan adalah

---

<sup>4</sup>27 Abdulkadir Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Pertanggungan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), hal 58



satu, apabila sudah dicapai kata sepakat diantara para pihak. Penanggung maupun tertanggung keduanya sudah sepakat atas semua syarat yang sudah disepakati bersama. Jadi kata sepakat pada perjanjian asuransi atau perjanjian pertanggungan merupakan dasar atau landasan bagi ada atau tidaknya perjanjian asuransi.<sup>5</sup> Polis itu tetap mempunyai arti yang besar bagi pihak tertanggung. Sebab polis itu merupakan bukti yang sempurna tentang apa yang mereka perjanjikan di dalam perjanjian pertanggungan itu. Tanpa polis maka pembuktian akan menjadi sulit dan terbatas.<sup>6</sup>

### 3. Pengertian Asuransi Jiwa

Menurut H.M.N Purwosutjipto, “Asuransi jiwa dapat diartikan sebagai pertanggungan jiwa adalah perjanjian timbal balik antara penutup (pengambil) asuransi dengan penanggung dengan mana penutup asuransi mengikatkan diri selama jalannya pertanggungan membayar uang premi kepada penanggung, sedangkan penanggung sebagai akibat langsung dari meninggalnya orang yang jiwanya dipertanggungkan atau telah lampaunya suatu jangka waktu yang diperjanjikan mengikat diri untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada orang yang ditunjuk untuk penutup asuransi sebagai penikmatnya.”<sup>7</sup>

Kemudian menurut Volmar, menyebutkan pertanggungan jiwa itu dengan istilah *sommen verzekering*, berpendapat bahwa: “Secara luas *sommen verzekering* itu dapat diartikan sebagai suatu perjanjian dimana suatu pihak mengikatkan dirinya untuk membayar sejumlah uang secara sekaligus atau periodik, sedangkan pihak mengikatkan dirinya untuk membayar premi dan pembayaran itu adalah tergantung kepada hidup atau matinya seseorang tertentu atau lebih.”<sup>8</sup>

Dari beberapa pengertian tentang asuransi jiwa yang dikemukakan oleh

---

<sup>5</sup> Sri Redjeki Hartono, Op cit., hal 123

<sup>6</sup> Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggungan: Pokok-pokok Pertanggungan Kerugian, kebakaran dan jiwa*, (Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, 1990), hal 20

<sup>7</sup> H.M.N Purwosutjipto, SH, *Pengertian Pokok Hukum Dagang*, Jilid 6 Hukum Perdagangan, Djambatan, Jakarta 1992, hal 9

<sup>8</sup> Prof. Emmy Pangaribuan Simanjuntak, SH, 1990, *Hukum Pertanggungan*, Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1975, hal 91

para pakar hukum di atas ada beberapa hal yang sebenarnya harus ada dalam suatu asuransi jiwa. Dimana asuransi jiwa tersebut merupakan perjanjian timbal balik antara penanggung dengan tertanggung yang bertujuan untuk mengatasi resiko atau peristiwa yang dapat merugikannya.

#### 4. Dasar Hukum Asuransi Jiwa

a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Perjanjian Asuransi tidak termasuk perjanjian yang secara khusus diatur dalam KUHPerdata, tetapi pengaturannya dalam KUHD.

- 1) Pasal 1313 KUHPerdata.
- 2) Pasal 1320 KUHPerdata
- 3) Pasal 1318 KUHPerdata
- 4) Pasal 1253 sampai dengan Pasal 1262 KUHPerdata
- 5) Pasal 1338 KUHPerdata ayat (1)
- 6) Pasal 1339 KUHPerdata
- 7) Pasal 1342 sampai dengan pasal 1351 KUHPerdata
- 8) Pasal 1365 KUHPerdata
- 9) Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD)
- 10) Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD)
- 11) Pasal 257 KUHD
- 12) Pasal 258 KUHD
- 13) Pasal 269 KUHD

#### 5. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Asuransi

a. Hak dan Kewajiban Penanggung

- 1) Penanggung wajib memberikan ganti kerugian atau sejumlah uang dalam perjanjian Asuransi, sesuai dengan ketentuan Pasal 1339
- 2) Penanggung wajib untuk melaksanakan ketentuan perjanjian yang telah disepakati. Hal tersebut seperti yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1), (2), (3).

a. Hak dan Kewajiban Tertanggung

- 1) Tertanggung wajib membayar premi kepada penanggung.
- 2) Pemegang polis/tertanggung dapat menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga dengan memperhatikan Pasal 1267 KUHPerdata yaitu : *“Bahwa pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilaksanakan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga.*

- 3) Ahli waris dari tertanggung dalam perjanjian Asuransi juga mempunyai hak untuk dilaksanakan prestasi dari perjanjian tersebut. Hal ini disimpulkan dalam Pasal 1318 KUHPerdara.
- 4) Tertanggung wajib untuk melaksanakan ketentuan perjanjian yang telah disepakatinya.

#### 6. Evenemen<sup>9</sup>

Dalam asuransi jiwa, satu-satunya evenemen yang menjadi beban penanggung adalah meninggalnya tertanggung. Apabila dalam jangka waktu yang diperjanjikan tidak terjadi peristiwa meninggalnya tertanggung, maka penanggung berkewajiban membayar uang santunan kepada penikmat yang ditunjuk oleh tertanggung, atau kepada ahli warisnya. Sejak penanggung melunasi pembayaran uang santunan tersebut, sejak itu pula asuransi jiwa berakhir. Dengan kata lain, asuransi jiwa berakhir sejak terjadi evenemen yang diikuti dengan pelunasan klaim.

### C. Metode Penelitian

Metode Penelitian digunakan untuk mengumpulkan data guna mendapatkan jawaban atas pokok permasalahan, sehingga data yang diperoleh dari penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>10</sup>

1. Metode Penelitian digunakan untuk mengumpulkan data guna mendapatkan jawaban atas pokok permasalahan, sehingga data yang

---

<sup>9</sup>Loc,cit.

<sup>10</sup>Rianto Adi, 2004, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, halaman 3.

diperoleh dari penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>11</sup>

## 2. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini membutuhkan dua jenis data yang berasal dari dua sumber yang berbeda, yaitu :

### 1) Data Sekunder

Yaitu data yang berasal dari bahan-bahan pustaka, baik yang meliputi :

- a) Dokumen-dokumen tertulis, yang bersumber dari peraturan perundang-undangan (hukum positif Indonesia), buku-buku literatur, dokumen-dokumen resmi, arsip dan publikasi dari lembaga-lembaga yang terkait
- b) Dokumen-dokumen yang bersumber dari data-data statistik, baik yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah, maupun oleh perusahaan, yang terkait dengan fokus permasalahannya

### 2) Data Primer

Yaitu data-data yang berupa keterangan-keterangan yang berasal dari pihak-pihak yang terlibat dengan objek yang diteliti., yang dimaksudkan untuk dapat lebih memahami maksud dan arti dari data sekunder yang ada.

## D. Hasil Penelitian

1. Bentuk-bentuk Evitement yang Dapat Menimbulkan Hak Bagi Tertanggung yang Terlibat Dalam Prudential Unit Link untuk Mengajukan Klaim Di PT Prudentail Life Assurance Surakarta

---

<sup>11</sup>Rianto Adi, 2004, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, halaman 3.

Dalam Pasal 304 KUHD yang mengatur tentang isi polis, tidak ada ketentuan keharusan mencantumkan evenemen dalam polis asuransi jiwa berbeda dengan asuransi kerugian, Pasal 256 ayat (1) KUHD mengenai isi polis mengharuskan Pencantuman bahaya-bahaya yang menjadi beban penanggung. Dalam asuransi jiwa yang dimaksud dengan hahaya adalah meninggalnya orang yang jiwanya diasuransikan. Meninggalnya seseorang itu merupakan hal yang sudah pasti, setiap makhluk bernyawa pasti mengalami kematian. Akan tetapi kapan meninggalnya seseorang tidak dapat dipastikan. Inilah yang disebut peristiwa tidak pasti (evenemen) dalam asuransi jiwa.

## 2. Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung yang Mengajukan Klaim dalam Prudential Unit Link Di PT Prudentail Life Assurance Surakarta.

Setelah dokumen yang diminta oleh penanggung dilengkapi oleh tertanggung maka penanggung akan memeriksa keabsahan dokumen klaim dengan memperhatikan prinsip dasar penyelesaian klaim, meliputi teknis (apakah penyebab klaim terjamin dalam kondisi pertanggungan), legal (apakah penyebab klaim dikecualikan dalam kondisi pertanggungan) dan formal (dokumen pendukung klaim yang diminta sesuai dengan ketentuan umum yang berlaku).

Setelah dianalisa maka analisa tersebut akan dituangkan kedalam risalah analisa klaim. Dalam risalah analisa ini diputuskan apakah klaim dijamin atau tidak.

Apabila jumlah klaim yang akan diselesaikan masih merupakan limit cabang maka dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan bahwa klaim terjamin, uang santunan sudah harus diserahkan kepada tertanggung. Apabila jumlah klaim yang akan diselesaikan merupakan limit kantor pusat maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan klaim terjamin, uang santunan sudah harus diserahkan kepada tertanggung.

## 3. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa dan upaya penyelesaiannya Klaim Prulink (Prudential Unit Link) di

PT. Prudential Life Assurance Surakarta.

Hambatan paling utama adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang asuransi, sehingga masyarakat segan untuk mengajukan klaim. Masyarakat menganggap mengajukan klaim itu sulit karena prosedurnya berbelit-belit.

## **E. Kesimpulan dan Saran**

### **1. Kesimpulan**

1. Bentuk-bentuk evinement yang dapat menimbulkan hak bagi tertanggung yang terlibat dalam prudential unit link untuk mengajukan klaim Di PT Prudentail Life Assurance Surakarta:
  - a. Evinement dalam bentuk: meninggalnya tertanggung yang tidak disebabkan dalam pengecualian polis, yang terdapat dalam prudential unit link untuk di PT Prudentail Life Assurance Surakarta, telah sesuai dengan Pasal 256 point 12 KUHD, Pasal 1 ayat 6 UU No.2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian
  - b. Evinement dalam bentuk: Kondisi kritis yang dialami oleh tertanggung sebelum berlalunya tenggang waktu 90 hari sejak tanggal mulai pertanggungan asuransi, Perang, invansi, Kondisi krisis yang dialami oleh tertanggung sebelum tanggal mulai pertanggungan asuransi, dan Kondisi kritis yang telah dialami oleh tertanggung yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tercantum dalam pengecualian polis asuransi yang terdapat dalam prudential unit link untuk di PT Prudentail Life Assurance Surakarta, tidak sesuai dengan Pasal 1 ayat 6 UU No.2 Tahun 1992, Pasal 304 KUHD, Pasal 1320 KUHPerdara
2. Perlindungan hukum terhadap tertanggung yang mengajukan klaim dalam prudential unit link Di PT Prudentail Life Assurance Surakarta
  - a. Tertanggung yang mengajukan klaim dalam prudential unit link Di PT Prudentail Life Assurance Surakarta, telah memperoleh perlindungan hukum dalam hal

- 1) menuntut pembayaran premi kepada tertanggung sesuai dengan perjanjian.
- 2) meminta keterangan yang benar dan lengkap kepada tertanggung yang berkaitan dengan obyek yang diasuransikan kepadanya.
- 3) memiliki premi dan bahkan menuntutnya dalam hal peristiwa yang diperjanjikan terjadi tetapi disebabkan oleh kesalahan tertanggung sendiri.
- 4) memiliki premi yang sudah diterima dalam hal asuransi batal atau gugur yang disebabkan oleh perbuatan curang dari tertanggung. Melakukan asuransi kembali kepada penanggung yang lain, dengan maksud untuk membagi risiko yang dihadapinya.
- 5) Melakukan asuransi kembali kepada penanggung lain dengan maksud untuk membagi resiko yang dihadapinya

Hal ini sesuai dengan Pasal 276 KUHD, Pasal 282 KUHD, Pasal 271 KUHD dan pendapat Prof. Dr. H. Man Suparman Sastrawidjaja, S.H., S.U yang menerangkan mengenai hak dan kewajiban tertanggung.

- b. Tertanggung yang mengajukan klaim dalam prudential unit link Di PT Prudentail Life Assurance Surakarta, belum memperoleh perlindungan hukum dalam hal: ketidaksesuaian dalam pembayaran premi; keterlambatan dalam pengajuan klaim; keterlambatan dalam laporan; pembayaran premi tidak sesuai dengan ketentuan dalam polis, tidak adanya kejelasan dalam pelaporan klaim, penyelesaian klaim yang memakan waktu lama hal ini tidak sesuai dengan Pasal 306 KUHD Pasal 1338 KUHD Pasal 1253 s.d. Pasal 1262 KUH Perdata dan sesuai dengan pendapat Prof. Dr. H. Man Suparman Sastrawidjaja, S.H., S.U yang menerangkan hak dan kewajiban penanggung.

## **2. Saran**

1. Sumber daya manusia di Prulink PT. Prudential Life Assurance perlu untuk lebih ditingkatkan kemampuannya ke arah yang lebih baik,

terutama bagi para staf penjualan, yang secara langsung berhubungan dengan para nasabah yang akan menutup asuransi, misalnya melalui *training* atau seminar mengenai pentingnya perjanjian bagi setiap orang, sehingga staff penjualan tidak hanya mengejar target premi saja namun juga mengurangi kesalahpahaman apabila terjadi klaim nantinya. Demikian pula halnya dengan petugas klaim dan petugas penagihan premi.

2. Pentingnya menyadari bahwa keterlibatan tertanggung maupun penanggung secara pro aktif dalam proses penyelesaian klaim akan membuat proses tersebut menjadi lebih cepat dari yang diharapkan sehingga akan memberikan kepuasan bagi kedua belah pihak.

## F. DAFTAR PUSTAKA

- A. Hasyim Ali., 2002, *Pengantar Asuransi*. Bumi Aksara ,
- Abdulkadir Muhammad., 1999, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Agus Prawoto., 2003, *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi Berdasarkan Risk Base Capital*, BPFE, Yogyakarta,
- Agus Sudjiono & Abdul Sudjanto., 1997, *Prinsip dan Praktek Asuransi*, LPAI, Jakarta.
- BambangSunggono., 1997, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Pustaka, Jakarta.
- CST Kansil., 1996, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak., 1990, *HukumPertanggung*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. , 1983, *Hukum Pertanggung dan Perkembangannya*, Badan Pembinaan Hukum Nasional
- Departemen Kehakiman RI, Seksi Hukum Dagang FH UGM, Yogyakarta.
- H. Hari Saheroji., 1980, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Aksara Baru, Jakarta.
- H.M.N Purwosutjipto., 2003, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Kursus Asuransi Tingkat B Kerugian, 2006, *Asuransi General Accident*, Lembaga Pendidikan Asuransi Indonesia, Jakarta.
- Mariam Barus Badruzaman., 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, PT Alumni, Bandung.
- Suparman Sastrawidjaja., 1997, *Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, PT Alumni, Bandung
- Suparman Sastrawidjaja dan Endang., 1993, *Hukum Asuransi, Perlindungan*



- Tertanggung Asuransi Deposito*, PT. Alumni, Bandung.
- M. Yahya Harahap., 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, PT Alumni, Bandung.
- Mashudi & Moch. Chidir., 1998, *Hukum Asuransi*, Mandar Maju, Bandung.
- Radiks Purba., 1992, *Memahami Asuransi di Indonesia*, Seri Umum Nomor 10, PT Pustaka Binaman Pressindo, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1997, *Mengenal Asuransi Angkatan Darat dan Udara*, Djambatan, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro., *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soejono Soekanto., 1980, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji., 1986, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, PT Rajawali Press, Jakarta.
- Sri Rejeki Hartono., 2008, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1985, *Asuransi dan Hukum Asuransi*, IKIP Semarang Press, Semarang
- Subekti., 1987, *Hukum Perjanjian*, PT Internusa, Jakarta.

### **Perundang-undangan**

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata  
 Kitab Undang – Undang Hukum Dagang  
 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian  
 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian yang telah dirubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008  
 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi  
 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.